

# **PENGARUH REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENETAPAN PAGU INDIKATIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI**

**Juwita Sari Winter**

sariwinter@yahoo.com

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The study intends to determine and analyze: 1) the realization of personnel expenditure budget, goods expenditure, capital expenditure and indicative budget preparation; 2) the significant impact of realization of personnel expenditure budget, goods expenditure and capital expenditure on determining indicative budget; 3) the significant impact of the realization of personnel expenditure budget on indicative budget preparation; 4) the significant impact of the realization of goods expenditure budget on indicative budget preparation; 5) the significant impact of the realization of capital expenditure budget on indicative budget preparation. The study applies multiple linear regressions analysis with SPSS 17.0. Population consists of working units in The Ministry of Religion and sample is determined by purposive sampling method. The result indicates that: 1) realization of personnel expenditure budget, goods expenditure and capital expenditure have significant impacts on indicative budget preparation; 2) personnel expenditure budget realization has significant impact on indicative budget preparation; 3) goods expenditure realization has significant impact on indicative budget preparation; 4) capital expenditure realization has significant impact on indicative budget preparation.*

**Keywords:** *realization of personnel expenditure budget, goods expenditure, capital expenditure and indicative budget preparation.*

Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk membantu tercapainya kesejahteraan rakyat melalui penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka fungsi utama anggaran adalah sebagai salah satu instrumen perencanaan. Sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat komponen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran dan umpan balik anggaran (Halim, 2008)

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak terlepas dari penyusunan pagu indikatif yang merupakan batas tertinggi atas belanja kementerian/lembaga yang tidak dapat dilampaui dalam penentuan besarnya anggaran.

Sebagai bagian dari penyusunan anggaran belanja di kementerian/lembaga penyusunan pagu indikatif merupakan suatu proses yang menghasilkan keluaran berupa surat bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perkembangan realisasi anggaran belanja Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan maupun penurunan pada masing-masing belanja. Hal ini terkait erat dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan aparatur, pembiayaan pemeliharaan dan penambahan aset, serta semakin besarnya fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Agama. Secara terinci perkembangan realisasi belanja Satker Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel1 berikut ini.

**Tabel 1 : Perkembangan Realisasi Belanja dan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai TA. 2012 – 2014**

Belanja	2012		2013		2014	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	32.057.811.000	29.438.369.518	30.006.947.000	30.356.076.783	45.008.774.000	44.449.737.436
Belanja Barang	6.223.758.000	6.009.736.149	6.961.160.000	6.845.692.781	7.241.165.000	6.957.218.630
Belanja Modal	3.790.100.000	3.756.235.000	1.833.060.000	1.828.880.000	3.675.707.000	3.630.095.226
<b>Total</b>	<b>42.071.669.000</b>	<b>39.204.340.667</b>	<b>38.803.167.000</b>	<b>39.030.649.564</b>	<b>55.925.616.000</b>	<b>55.037.051.292</b>

Sumber : *Bagian Keuangan Kantor Kemenag Kab. Banggai, data diolah*

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa besarnya belanja pegawai mengalami kenaikan jumlah realisasi dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Begitu pula yang terjadi pada belanja barang terlihat mengalami kenaikan jumlah realisasi anggaran dari tahun 2012 sampai tahun 2014 meskipun besarnya realisasi belum mencapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi belanja modal mengalami penurunan di tahun 2013 dan kenaikan di tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2014 satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan target-target anggaran yang mengalami perkembangan dikarenakan adanya kebutuhan akan pembiayaan aparatur yang terkait dengan belanja pegawai, pembiayaan yang terkait dengan belanja barang dikarenakan semakin berfungsinya pelayanan yang dilakukan oleh satker dan penambahan aset sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Mahsun, dkk (2013:120) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

Mustaqim (2011) menyatakan bahwa dalam menetapkan pagu indikatif seharusnya merujuk pada laporan realisasi anggaran sebab pada laporan realisasi anggaranlah dapat memberikan informasi tentang realisasi anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa pada realisasi anggaran juga dapat diukur kinerja suatu satuan kerja seperti yang disyaratkan dalam sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja..

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pengawasan internal dan penyelesaian realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal baik secara simultan dan parsial terhadap penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 55) metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta menggunakan data numerik (angka),

yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai yang terdiri dari 15 satuan kerja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono (2013 : 85) menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, penentuan sampel ditentukan pada kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria tersebut adalah :

1. Satuan kerja yang memiliki realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
2. Satuan kerja yang memiliki pagu indikatif belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi (9) sembilan satuan kerja.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Periode yang dianalisis yaitu data dari tahun 2012 sampai dengan 2015 untuk variabel X dan tahun 2013 sampai dengan 2016 untuk variabel Y. Data tersebut diperoleh dari bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja sebagai variabel independen (X) yang terdiri atas realisasi anggaran belanja pegawai (X1), realisasi anggaran belanja barang (X2) serta realisasi anggaran belanja modal (X3) sedangkan penetapan pagu indikatif sebagai variabel dependen (Y). Defenisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (X1) adalah kemampuan menyerap anggaran belanja pegawai dalam pelaksanaan

program kerja pada satuan kerja. Belanja pegawai adalah belanja yang menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (Darwis, 2015). Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja uang makan dan belanja uang lembur.

2. Realisasi Anggaran Belanja Barang (X2) adalah kemampuan menyerap anggaran belanja barang dalam pelaksanaan program kerja pada satuan kerja. Belanja barang adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara (Suminto, 2004). Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.
3. Realisasi Anggaran Belanja Modal (X3) adalah kemampuan menyerap anggaran belanja modal dalam pelaksanaan program kerja pada satuan kerja. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2007). Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja aset lainnya (aset tak berwujud). Namun belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai tidak memiliki belanja tersebut.
4. Pagu Indikatif (Y) adalah penetapan nilai nominal anggaran belanja dalam satu tahun

anggaran yang dimulai sejak bulan Januari sampai bulan Desember untuk membiayai program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja (Mustaqim, 2011)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik telaah dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran, RKAK/L dan Daftar Usulan Pagu Indikatif satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : Realisasi Anggaran Belanja Pegawai ( $X_1$ ), Realisasi Anggaran Belanja Barang ( $X_2$ ) dan Realisasi Anggaran Belanja Modal ( $X_3$ ) terhadap variabel terikatnya yaitu Penetapan Pagu Indikatif ( $Y$ ). Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

$Y$  = Pagu Indikatif (Variabel Dependen)

$\alpha$  = Intersep (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (Variabel Independen)

$X_2$  = Realisasi Anggaran Belanja Barang (Variabel Independen)

$X_3$  = Realisasi Anggaran Belanja Modal (Variabel Independen)

$e$  = Kesalahan pengganggu (*error term*)

### 3. Pengujian Hipotesis

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

Realisasi anggaran belanja pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja pegawai pada 9 satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Variabel realisasi anggaran belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2: Perkembangan realisasi anggaran belanja pegawai Tahun 2012-2015**

No	Satuan Kerja	T.A 2012 (Rp)	T.A 2013 (Rp)	T.A 2014 (Rp)	T.A 2015 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	715.466.116	829.661.553	1.059.679.227	1.151.258.933
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	2.278.106.891	2.310.102.353	3.131.179.178	6.040.919.602
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	1.163.529.283	1.321.829.080	1.335.748.361	1.616.461.289
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	412.583.305	410.705.369	594.680.946	918.399.778
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	789.200.690	953.940.086	1.279.042.233	1.331.696.747
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	904.277.492	1.090.572.308	1.189.802.810	1.558.379.014
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	3.104.745.747	3.042.433.956	3.034.086.523	3.471.983.351
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	1.183.530.129	1.147.194.566	1.555.263.977	1.564.584.107
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	2.863.268.374	3.119.206.776	3.376.840.658	3.213.637.167

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja pegawai pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai mengalami peningkatan maupun penurunan di tiap tahunnya. Namun pada tahun 2015 hampir semua satuan kerja mengalami kenaikan jumlah realisasi anggaran belanja pegawai dan yang mengalami kenaikan jumlah realisasi anggaran belanja pegawai yang cukup tinggi adalah satuan kerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang mencapai Rp. 6.040.919.602 di tahun 2015 yang sebelumnya hanya Rp. 3.131.179.178, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan belanja tunjangan kinerja tahun 2014 yang dibayarkan di tahun 2015.

### Realisasi Anggaran Belanja Barang

Realisasi anggaran belanja barang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja barang pada 9 satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Variabel realisasi anggaran belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3: Perkembangan realisasi anggaran belanja barang Tahun 2012-2015**

No	Satuan Kerja	T.A 2012 (Rp)	T.A 2013 (Rp)	T.A 2014 (Rp)	T.A 2015 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	867.686.169	800.630.781	856.754.059	1.177.288.835
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	1.313.802.600	2.011.168.000	2.035.865.000	1.656.061.000
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	317.337.350	320.171.800	325.218.571	309.466.000
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	267.311.000	305.773.000	268.274.000	310.595.000
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	248.368.400	243.344.000	282.476.000	338.166.000
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	319.741.450	302.880.500	300.776.250	321.850.500
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	531.335.000	675.144.700	874.324.000	805.770.500
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	340.219.980	347.542.000	440.363.000	438.746.500
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	403.464.800	399.863.000	390.015.850	576.817.400

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja barang pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai mengalami peningkatan maupun penurunan di tiap tahunnya. Berbeda dengan realisasi anggaran belanja pegawai pada realisasi anggaran belanja barang peningkatan dan penurunan nilai realisasi tidak begitu signifikan hal ini dikarenakan jumlah kebutuhan akan biaya operasional perkantoran yang meningkat pada tiap tahunnya serta program dan kegiatan-kegiatan yang sama dilakukan ditiap tahunnya.

**Realisasi Anggaran Belanja Modal**

Realisasi anggaran belanja modal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja modal pada 9 satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Variabel realisasi anggaran belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4: Perkembangan realisasi anggaran belanja modal Tahun 2012-2015**

No	Satuan Kerja	T.A 2012 (Rp)	T.A 2013 (Rp)	T.A 2014 (Rp)	T.A 2015 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	1.519.295.000	97.000.000	14.000.000	575.631.473
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	450.112.000	221.650.000	51.000.000	545.791.413
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	414.625.000	264.000.000	276.231.000	226.476.750
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	189.500.000	27.500.000	345.169.000	254.488.000
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	86.100.000	249.810.000	409.602.000	203.600.000
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	129.700.000	145.500.000	791.875.000	629.263.027
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	265.500.000	399.500.000	459.519.000	454.139.000
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	162.000.000	206.800.000	472.682.113	518.558.000
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	530.703.000	199.920.000	780.017.113	2.619.402.392

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja modal pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai mengalami peningkatan maupun penurunan di tiap tahunnya. Satuan kerja yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2012 adalah satuan kerja sekretariat jenderal yang pada tahun 2012 mencapai Rp. 1.519.295.000 dikarenakan terdapat belanja modal berupa penambahan gedung kantor, sementara ditahun-tahun berikutnya hanya berupa belanja modal pengadaan peralatan dan mesin. Kenaikan dan penurunan jumlah realisasi belanja modal pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai menunjukkan adanya prioritas kebutuhan akan belanja modal yang berubah-ubah di tiap tahunnya.

**Pagu Indikatif**

Pagu indikatif yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup mencakup total dari keseluruhan pagu indikatif belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada 9 satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Terdapat peningkatan maupun penurunan jumlah pagu indikatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 pada tiap-tiap satuan kerja dikarenakan kebutuhan akan anggaran yang berubah tiap tahunnya di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Variabel pagu indikatif dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 5: Pagu Indikatif Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2013-2014**

No	Satuan Kerja	Pagu Indikatif (Rp)		Persentase Penambahan/ Penurunan
		2013	2014	
1	Sekretariat Jenderal	4.792.474.000	2.801.042.000	-41,55 %
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	6.928.193.000	5.794.826.320	-16,35 %
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	2.337.354.400	3.455.384.650	32,35 %
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	1.658.874.451	1.827.875.500	9,24 %
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	1.493.541.050	2.108.577.700	19,16 %
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	1.717.020.560	2.898.377.056	40,75 %
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	4.640.797.016	5.297.519.000	12,39 %
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	5.830.129.500	2.789.793.000	-52,14 %
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	4.702.622.300	5.404.987.000	12,99 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan maupun penurunan jumlah pagu indikatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan merupakan satuan kerja yang mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2014 sebesar 40,75% hal ini disebabkan pada tahun 2014 satuan kerja ini memiliki pagu indikatif yang meningkat pada belanja modal dikarenakan kebutuhan akan rehab gedung bangunan sekolah sedangkan untuk pagu indikatif yang mengalami penurunan yang signifikan adalah satuan kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama sebesar 52,14%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2013 satuan kerja ini memiliki pagu indikatif pada belanja modal yang cukup besar yang diperuntukan untuk penambahan pembangunan gedung sekolah.

**Tabel 6 : Pagu Indikatif Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2014-2015**

No	Satuan Kerja	Pagu Indikatif (Rp)		Persentase Penambahan/ Penurunan
		2014	2015	
1	Sekretariat Jenderal	2.801.042.000	3.105.924.000	9,81 %
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.794.826.320	5.960.557.000	2,78 %
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	3.455.384.650	2.508.102.850	-27,41 %
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	1.827.875.500	2.044.832.427	10,61 %
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	2.108.577.700	2.762.332.000	23,66 %
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	2.898.377.056	2.305.132.000	-20,46 %
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	5.297.519.000	5.096.674.000	-3,79 %
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	2.789.793.000	2.619.724.000	-6,09 %
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	5.404.987.000	5.038.014.400	-6,78 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 peningkatan pagu indikatif paling tinggi hanya sebesar 23,66 % dari tahun sebelumnya dan dimiliki oleh satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban. Peningkatan jumlah pagu indikatif ini disebabkan terdapat kebutuhan anggaran yang lebih banyak pada belanja modal berupa penambahan gedung dan meubelir sekolah. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk pada tahun 2015 memiliki pagu indikatif yang menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan yang mencapai 27,41 % ini juga disebabkan oleh kebutuhan akan anggaran belanja modal yang lebih besar pada tahun 2014.

**Tabel 7: Pagu Indikatif Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2015-2016**

No	Satuan Kerja	Pagu Indikatif (Rp)		Persentase Penambahan/ Penurunan
		2015	2016	
1	Sekretariat Jenderal	3.105.924.000	4.417.460.000	29,68 %
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.960.557.000	9.079.513.000	34,35 %
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	2.508.102.850	2.923.908.700	14,22 %
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin Jaya	2.044.832.427	2.286.245.313	10,55 %
5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban	2.762.332.000	2.365.393.700	-14,36 %
6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kilongan	2.305.132.000	3.449.106.000	33,16 %
7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	5.096.674.000	6.571.197.000	22,43 %
8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Masama	2.619.724.000	3.767.528.900	30,46 %
9	Madrasah Aliyah Negeri Luwuk	5.038.014.400	7.555.945.400	33,32 %

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hampir seluruh satuan kerja mengalami peningkatan jumlah pagu indikatif pada tahun 2016 dan hanya satu satuan kerja yang mengalami penurunan jumlah pagu indikatif yaitu satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangeban. Penurunan sebesar 14.36% dari tahun sebelumnya tersebut disebabkan oleh pagu indikatif pada belanja modal yang berkurang pada tahun 2016. Satuan Kerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mengalami peningkatan jumlah pagu indikatif terbesar yaitu sebesar 34.35 % hal ini disebabkan pada tahun 2016 satuan kerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mengusulkan pagu indikatif yang cukup besar pada belanja modal berupa rehab dua gedung balai nikah, selain itu pagu indikatif pada belanja pegawai juga meningkat dikarenakan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pada tahun sebelumnya.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda menggunakan program SPSS 17.0, adapun hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 8.

**Tabel 8 : Rekapitulasi Hasil Analisis Berganda**

Variabel Dependen (Y) = Pagu Indikatif				
Variabel Independent (X)	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig.
Constanta	0.223	0.061	3.674	0.001
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (X <sub>1</sub> )	0.389	0.073	5.335	0.000
Realisasi Anggaran Belanja Barang (X <sub>2</sub> )	0.346	0.069	4.989	0.000
Realisasi Anggaran Belanja Modal (X <sub>3</sub> )	0.089	0.039	2.278	0.030
R	= 0.908			
Adjusted R Square (R <sup>2</sup> )	= 0.807			
F <sub>hitung</sub>	= 49.841			
Sig F	= 0.000			

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0.223 + 0.389X_1 + 0.346X_2 + 0.089X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 0.223. Hal ini mengindikasikan bahwa Penetapan Pagu Indikatif (Y) mempunyai nilai sebesar 0.223 dengan tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas (Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Realisasi Anggaran Belanja Modal).
2. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai yang diukur dengan jumlah realisasi belanja pegawai setiap tahunnya selama 4 (empat) Tahun yaitu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.389. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi Anggaran Belanja Pegawai akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif.
3. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Barang yang diukur dengan jumlah realisasi belanja barang setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.346. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi Anggaran Belanja Barang akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif.
4. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Modal yang diukur dengan jumlah realisasi belanja modal setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.089. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi

Anggaran Belanja Modal akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif.

**Hasil Uji Statistik F**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan Uji Statistik F ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut :

**Tabel 9 : Hasil Uji Statistik F**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.013	3	.004	49.841	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.003	32	.000		
	Total	.015	35			

a. Predictors: (Constant), Realisasi Anggaran Belanja Modal, Realisasi Anggaran Belanja Barang, Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Pagu Indikatif

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Hasil analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 49.841 dengan probabilitas 0,000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Realisasi Anggaran Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.

**Hasil Uji Statistik t**

Hasil Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini :

**Tabel 10 : Hasil Uji Statistik t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.223	.061		3.674	.001	.089	.347						
	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	.389	.073	.516	5.335	.000	.240	.537	.824	.686	.396	.589	1.688	
	Realisasi Anggaran Belanja Barang	.346	.069	.448	4.989	.000	.205	.488	.727	.661	.370	.684	1.462	
	Realisasi Anggaran Belanja Modal	.089	.039	.187	2.278	.030	.009	.168	.382	.374	.169	.820	1.220	

a. Dependent Variable: Pagu Indikatif

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi, tampak bahwa 3 (tiga) variabel bebas yaitu Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Realisasi Anggaran Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Penetapan Pagu Indikatif, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, 0.000 dan 0.030. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari pada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%.

Berdasarkan Tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa variabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan pagu indikatif dengan nilai t-hitung sebesar 5.335, sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis Kedua yang menyatakan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.

Variabel Realisasi Anggaran Belanja Barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai t-hitung sebesar 4.989, sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis Ketiga yang menyatakan bahwa Realisasi Anggaran Belanja



Barang berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.

Variabel Realisasi Anggaran Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai t-hitung sebesar 2.278, sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0.030 lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis Keempat yang menyatakan bahwa Realiasi Anggaran Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Menurut Santoso dalam buku (Priyatno,2008:81),Adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R square dari angka ini bisa memiliki harga negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R<sup>2</sup> sebagai koefisien determinasi). Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini :

**Tabel 11 : Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.908 <sup>b</sup>	.824	.807	.009164	.824	49.841	3	32	.000	1.584

a. Predictors: (Constant), Realisasi Anggaran Belanja Modal, Realisasi Anggaran Belanja Barang, Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Pagu Indikatif

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan *output* SPSS seperti pada Tabel 11 di atas tampak bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi nilai Ajusted R Square sebesar 0,807. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel bebas yaitu Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Realisasi Anggaran Belanja Modal terhadap variabel terikat yaitu Penetapan

Pagu Indikatif yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 80,70% sedangkan sisanya sebesar 19,30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

**PEMBAHASAN HIPOTESIS**

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (X1), Belanja Barang (X2) dan Belanja Modal (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif (Y) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim Karim (2011) yang membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja mencakup realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif.

Hasil penelitian Mustaqim Karim (2011) juga menyatakan bahwa strategi perencanaan penganggaran belanja dalam penetapan pagu indikatif harus dilakukan dengan melihat realisasi anggaran belanja tahun sebelumnya. Strategi penetapan pagu indikatif yang didasari atas realisasi belanja, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan kegiatan, juga diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan pengalokasian belanja dimaksud tetap dapat mendukung program dan kegiatan strategis Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.

Dirjen Anggaran (2014) menyatakan bahwa pagu indikatif disusun dan ditetapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKAK/L, pagu indikatif merupakan tahap awal dalam rangkaian siklus penganggaran dan bersifat ancar-ancar sebagai dasar penyusunan rencana

kerja K/L. Menteri keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan pagu anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga. Hasil evaluasi kinerja dapat tergambar pada laporan realisasi anggaran belanja.

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif (Y) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil realisasi anggaran belanja pegawai memiliki pengaruh secara parsial terhadap penetapan pagu indikatif. Adanya pengaruh yang positif dan cukup kuat dari realisasi anggaran belanja pegawai menunjukkan bahwa penetapan pagu indikatif ditentukan oleh besarnya realisasi anggaran belanja pegawai.

Realisasi anggaran belanja pegawai pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama secara keseluruhan pada tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan jumlah pagu indikatif untuk tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja yang ada di lingkungan kementerian agama cukup memperhatikan hal penetapan pagu indikatif untuk belanja pegawai yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kebutuhan akan biaya gaji beserta tunjangan pegawai yang meningkat.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim Karim (2011) yang menyatakan strategi perencanaan penganggaran belanja dalam penetapan pagu indikatif harus dilakukan dengan melihat realisasi belanja tahun sebelumnya termasuk realisasi belanja pegawai.

Sependapat dengan hal tersebut diatas, Riswan dan Viani (2012) mengatakan bahwa anggaran yang dilaksanakan untuk satu tahun kedepan tentunya harus mengacu pada anggaran dan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai tolak ukur pembuatan anggaran tahun berikutnya. Realisasi yang dimaksud tersebut adalah

realisasi belanja anggaran termasuk realisasi anggaran belanja pegawai.

**Realisasi Anggaran Belanja Barang (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif (Y) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan pagu indikatif di lingkungan kementerian Agama Kabupaten Banggai. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi realisasi anggaran belanja barang yang dicapai oleh satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banggai maka semakin tinggi pula jumlah penetapan pagu indikatif untuk tahun berikutnya.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wira Cipta Fattah (2012) menyatakan bahwa semakin besar realisasi anggaran belanja barang menunjukkan bahwa kebutuhan mengenai anggaran belanja barang dalam hal ini belanja operasional kebutuhan kantor semakin meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan anggaran untuk belanja barang tahun berikutnya. Dengan kata lain, semakin tinggi realisasi anggaran belanja barang, maka seharusnya menunjukkan semakin tinggi pula pagu indikatif untuk tahun berikutnya.

Wira Cipta Fattah (2012) juga menyatakan bahwa pengaruh positif realisasi anggaran belanja barang terhadap penetapan pagu indikatif karena dengan adanya realisasi anggaran belanja barang yang digunakan untuk membayar belanja barang/bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung, belanja cetak dan penggandaan, belanja jasa komunikasi, air dan listrik, belanja perjalanan dinas, belanja jasa konsultan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja sewa alat berat, belanja bahan/material (bahan baku bangunan) dapat mempengaruhi peningkatan besarnya permintaan penetapan pagu anggaran belanja barang.

### **Realisasi Anggaran Belanja Modal (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif (Y) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wira Cipta Fattah (2012) bahwa realisasi anggaran belanja modal secara parsial memberikan dampak yang signifikan terhadap penetapan pagu indikatif. Artinya bahwa realisasi anggaran belanja modal berdampak nyata terhadap besarnya penetapan pagu indikatif.

Menurut PP No. 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 menyatakan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan. Laporan kinerja memuat mengenai realisasi penyerapan anggaran yang dicapai oleh satker berdasarkan program dan kegiatan.

Hasil evaluasi yang dimaksud dalam laporan kinerja anggaran belanja baik belanja operasi maupun belanja modal dapat mengindikasikan apakah anggaran sebelumnya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini menegaskan bahwa dalam penetapan pagu anggaran belanja modal berikutnya haruslah berdasarkan evaluasi anggaran tahun sebelumnya sehingga pada penetapan pagu anggaran tahun berikutnya akan lebih efektif lagi dari tahun sebelumnya karena telah mempertimbangkan hasil evaluasi dari jumlah realisasi anggaran belanja modal itu sendiri.

Dirjen Anggaran (2015) mengatakan bahwa penetapan pagu indikatif perlu terlebih dahulu dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru, dan indikasi kebutuhan anggaran pada tahun selanjutnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan hasil capaian yang cukup baik. Penetapan pagu indikatif dari tahun 2013 sampai tahun 2016 juga sudah cukup baik akan tetapi dalam penetapan pagu definitif belum dilakukan dengan efektif terbukti dengan adanya pagu minus pada belanja pegawai.
2. Realisasi anggaran belanja pegawai, realisasi anggaran belanja barang dan realisasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.
3. Realisasi anggaran belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.
4. Realisasi anggaran belanja barang berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai.
5. Realisasi anggaran belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai

### **Saran**

1. Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai :
  - a. Lebih meningkatkan efektifitas mekanisme penganggaran pada masing-masing satuan kerja khususnya penetapan pagu indikatif yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan haruslah berdasarkan realisasi anggaran belanja dan dalam mengusulkan pagu haruslah realistis dan sesuai dengan kebutuhan rill

yang ada agar terhindar dari pemborosan anggaran dan pagu minus.

- b. Lebih memperhatikan tingkat pencapaian realisasi belanja. Apabila terjadi perubahan terhadap kebutuhan anggaran dan rencana kegiatan di tahun berjalan, harus diikuti dengan revisi DIPA. Hal ini dimaksudkan agar selisih antara pagu anggaran dan realisasi belanja dapat diminimalisir.

## 2. Bagi Peneliti selanjutnya:

- a. Dapat memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk melakukan penelitian pada masa akan datang dan menjadi salah satu sumber dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya dalam bidang anggaran serta lebih mengkaji mengenai pentingnya proses penetapan pagu indikatif yang merupakan tahap awal dari proses penganggaran pada satuan kerja.
- b. Agar menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi dalam penetapan pagu indikatif seperti realisasi anggaran pendapatan, sumber daya manusia, transparansi, dan pemahaman akuntansi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, SE., M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Vita Yanti Fattah, SE., M.Si. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

## DAFTAR RUJUKAN

Darwis, Estrelita Tria. 2015. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Vol.3.No.1*

Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. *Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 2016*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Anggaran. 2015. *Pokok – pokok Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fattah, Wira Cipta. 2012. *Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa dan Belanja Modal Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Pada Universitas Tadulako*. Tesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Tadulako, Palu.

Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.

Karim, Mustaqim. 2011. *Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Tesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Tadulako, Palu.

Mahsun, Firma.S, dan Herbertus. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.

Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Edisi Pertama. Mediakom. Jakarta.

Riswan dan Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. Vol.13. No.1. STIE. Banjarmasin*.

Undang-Undang APBN No. 47 Tahun 2009  
tentang *Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.*